



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARJO III
JALAN BUDI UTOMO NO.6 JAKARTA PUSAT 10710
TELEPON 021-3449230 Intern 5660, 021-3849670 FAKSIMILI 021-3849670
SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-1104/PB.7/2018
Sifat : Segera
Lampiran : 5 (lima) lembar
Hal : Tindak Lanjut Pemutakhiran Database Pejabat
Perbendaharaan Pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Jakarta, 30 Januari 2018

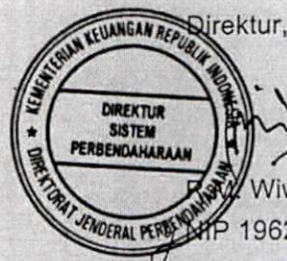
Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Menindaklanjuti surat Direktur Sistem Perbendaharaan No. S-227/PB.7/2018 tanggal 9 Januari 2018 hal Permintaan Pemutakhiran Database Pejabat Perbendaharaan Pada Satuan kerja Pengelola APBN, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut disampaikan Formulir Pejabat Perbendaharaan K/L yang disusun melalui Google Forms kepada KPPN untuk disampaikan kepada satker-satker di wilayah kerja masing-masing. Adapun responden dari pengisian formulir dimaksud adalah para KPA, PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu yang bertugas di satker-satker Kementerian Negara/Lembaga. Melalui surat tersebut, juga disampaikan kepada seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan diminta melakukan monitoring dan mengawasi pemutakhiran database Pejabat Perbendaharaan dimaksud.
2. Data Pejabat Perbendaharaan yang terkumpul sebagaimana dimaksud pada poin 1, merupakan database yang bermanfaat untuk analisis dan perumusan kebijakan dalam rangka standarisasi kompetensi dan pengembangan profesi sebagai upaya peningkatan kapasitas pengelola perbendaharaan serta dapat dimanfaatkan sebagai database pengelola perbendaharaan pada masing-masing KPPN. Selain itu, sebagai upaya pemutakhiran database yang telah dilakukan pada tahun 2017 serta dalam rangka pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Bendahara) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Analisis Laporan Keuangan).
3. Selain itu, sebagai upaya pemutakhiran database yang telah dilakukan pada tahun 2017 serta dalam rangka pembentukan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Bendahara) dan Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN (PPK, PPSPM, Analisis Laporan Keuangan).
4. Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah terkumpul dari Pejabat Perbendaharaan Satuan Satker Pengelola APBN di seluruh wilayah pembayaran KPPN, sampai dengan periode penyampaian terakhir tanggal 26 Januari 2018 pukul 17.00 WIB, telah terkumpul sebanyak 28.173 data dari 8.101 satker atau 39.48% dari total 20.518 satker. Terdapat sebanyak 110 KPPN yang progress penyampaian datanya di bawah 50%. Hasil rekapitulasi pemutakhiran data Pejabat Perbendaharaan per masing-masing Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Tahun 2018 (terlampir).

5. Sehubungan dengan pemutakhiran database Pejabat Perbendaharaan 2018 serta dalam rangka pembentukan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada poin 3, diperlukan kelengkapan dan penyempurnaan kembali data Pejabat Perbendaharaan Satker Pengelola APBN Tahun 2018.
6. Sebagai upaya penyempurnaan dan pemenuhan target pengisian data Pejabat Perbendaharaan Satker Pengelola APBN Tahun 2018, KPPN diminta agar:
 - a. Melakukan verifikasi ulang data Pejabat Perbendaharaan yang telah disampaikan Satker di wilayah pembayaran masing-masing karena masih banyak ditemukan pengisian data yang masih salah dan atau tidak lengkap. Verifikasi dapat dilakukan melalui daring <http://bit.ly/monitoringsurveyPP2018>. Verifikasi diharapkan dapat diselesaikan **paling lambat tanggal 6 Februari 2018 pukul 17.00 WIB**. Untuk perbaikan data dapat dilakukan dengan melakukan *editing* terhadap Google Sheets yang disediakan untuk masing-masing KPPN. Untuk kelancaran verifikasi dan *editing*, setiap KPPN mengajukan akses perubahan data melalui fasilitas yang telah disediakan pada Google Drive.
 - b. Meminta Pejabat Perbendaharaan yang belum mengisi dan atau melengkapi formulir data Pejabat Perbendaharaan pada Google Form yang akan kembali dibuka pada tanggal **7 Februari 2018 pukul 08.00 WIB** pada daring <http://bit.ly/surveyPP2018>. Pengisian data diharapkan dapat diselesaikan pada **tanggal 23 Februari 2018 pukul 17.00 WIB**.
7. Kanwil Ditjen Perbendaharaan agar melakukan monitoring dan langkah koordinatif dengan KPPN di wilayah kerja masing-masing agar data Pejabat Perbendaharaan dapat terkumpul secara maksimal.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan:
Direktur Jenderal Perbendaharaan